

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN PROV SUMSEL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Adapun tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah : "MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR DAERAH".

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Sasaran yang dibuat Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bersifat spesifik dapat dinilai dan terukur. Sasaran yang akan dicapai OPD Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam 3 (tiga) tahun adalah:

1. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
2. Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri
3. Terkendalinya Keterjangkauan Harga
4. Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

a) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.407.952.874,- yang terdiri atas :

Belanja Operasi	: Rp. 16.407.952.874,-
• Belanja Pegawai	: Rp. 9.494.674.000,-
• Belanja Barang & Jasa	: Rp. 6.713.278.874,-
• Belanja Modal	: Rp. 200.000.000,-

b) Program dan Anggaran APBD

Program dan Anggaran APBD terdiri atas 7 Program dan 15 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan sebesar Rp. 16.407.952.874,-, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 5) Program Pengembangan Ekspor;
- 6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 7) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

c) Program dan Anggaran APBN

pagu Anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : PR.03.00/39/PDN.1/SD/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Efisiensi Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan TA. 2025.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada Renstra

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR DAERAH		Neraca Perdagangan (juta US\$)	5.125	5.253	5.354
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku (%)	9%	10%	11%
		1.1 Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	1.1.1 Persentase penurunan pengaduan konsumen	0,05%	0,05%	0,05%
			1.1.2 Persentase penyelesaian permasalahan perselisihan konsumen	90%	90%	90%

			1.1.3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	70%	70%	70%	
			1.1.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	100%	100%	
		1.2	Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri	1.2.1	Nilai Ekspor Non Migas Luar Negeri	5.637	5.777	5.921
			1.2.2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,5 - 5 %	2,5 - 5 %	2,5 - 5 %	
		1.3.	Terkendalnya Keterjangkauan Harga	2.1.1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤5 %	≤5 %	≤5 %
		1.4.	Meningkatnya infrastruktur perdagangan	2.2.1	Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	25%	25%	25%

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Neraca Perdagangan (US\$ juta)	5.421	5.125	5.253	5.354	5.354
2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Sumsel untuk harga berlaku (%)	7,6	9	10	11	11

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (Lokasi)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Lokasi
1.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha bahan berbahaya yang diawasi	Rp. 34.248.400,-	Sumatera Selatan
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	Jumlah sarana dan Prasarana Perdagangan	Rp. 2.112.000.000,-	Sumatera Selatan

	Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Rp. 380.752.000,-	Sumatera Selatan
4.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi	Rp. 38.254.800,-	Sumatera Selatan
5.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang bagi produk ekspor unggulan	Rp. 554.156.243,-	• Luar Negeri, • Luar Provinsi • Sumatera Selatan
6.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Rp. 339.838.714,-	Sumatera Selatan
7.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Rp. 232.245.200,-	Sumatera Selatan
8.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Rp. 139.802.500,-	Sumatera Selatan
9.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	Rp. 122.500.000,-	Luar Provinsi

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan :

1. Maksud

Untuk memberikan arah Pembangunan bagi stakeholders dan perangkat daerah dalam menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025

2. Tujuan

- Memberikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di tahun 2025;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan tahun 2025;
- Mendukung Upaya pencapaian kesejahteraan Bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh perangkat daerah di dalam satu pola strategis dan Tindakan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah
- Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

A. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah.

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dan APBD Provinsi Sumatera Selatan :

a) Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d bulan ini	Realisasi s.d bulan ini	Target s.d akhir bulan	Realisasi s.d bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3/2*100%)	(6)	(7)
Total Belanja	16.407.952.874	10.155.353.974	75,00	61,89	75,00	75,48
Belanja Operasi	16.407.952.874	10.155.353.974	75,00	61,89	75,00	75,48
- Belanja Pegawai	9.494.674.000	6.312.435.408	75,00	66,48	75,00	75,00
- Belanja Barang dan Jasa	6.713.278.874	3.643.198.566	75,00	54,27	75,00	75,00
- Belanja Modal	200.000.000	199.750.000	75,00	99,88	75,00	100

b) Realisasi Belanja

- a. Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan TRIWULAN III Tahun Anggaran 2025 sebesar 10.155.353.974,- atau 61,89% dan realisasi fisik 75,48%.
- b. Realisasi Keuangan :
 1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0-40% : 7 sub kegiatan
 2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 40-60% : 8 sub kegiatan
 3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 60% : 17 sub kegiatan
- c. Realisasi Fisik :
 1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0-40% : 2 sub kegiatan
 2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 40-60% : 0 sub kegiatan
 3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 60% : 30 sub kegiatan

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	$90\% \leq 100\%$	Tinggi	Hijau
2	$66\% \leq 90\%$	Sedang	Kuning
3	$0\% \leq 65\%$	Rendah	Merah

Adapun Narasi Realisasi capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 90.642.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.787.400,- atau 88,02% dengan sisa pagu anggaran Rp. 10.854.600,-.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp. 15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.000.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 56.630.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 56.630.000,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 9.494.674.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.312.435.408 atau 66,48% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.182.238.592,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN PNS dan PPPK sebanyak 810 OB untuk 81 orang selama bulan Januari s.d Oktober 2025.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu Rp. 440.813.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 92% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 404.987.000,- atau 91,87% dengan sisa pagu anggaran Rp. 35.826.000,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa tenaga honorer selama bulan Januari s.d Agustus 2025.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 238.800.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.090.000,- atau 38,56% dengan sisa pagu anggaran Rp. 146.710.000,-.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Rp. 13.080.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.300.000,- atau 71,10% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.780.000,-.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 75% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 18.750.000,- atau 75%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 6.250.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 Paket komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas dan 3 Paket UPTD selama bulan Januari s.d September 2025;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu Rp. 108.335.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 75% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 72.748.000,- atau 67,15%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 35.587.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 paket alat tulis kantor dan 3 paket alat kebersihan dan bahan pembersih selama bulan Januari s.d September 2025;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 75% dan Realisasi keuangan

sebesar Rp. 36.959.000,- atau 67,20%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 18.041.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 paket barang cetakan dan penggandaan selama bulan Januari s.d September 2025;

- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp. 15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 75% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 10.605.000,- atau 70,70%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.395.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 dokumen selama bulan Januari s.d September 2025;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 515.455.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 75% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 234.459.180,- atau 45,49%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 280.996.020,- Hasil yang dicapai terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d September 2025;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 12.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.870.000,- atau 73,92% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.130.000,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama bulan Januari s.d September 2025;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 393.164.660,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 238.275.133,- atau 60,60% dengan sisa pagu anggaran Rp. 154.889.527,- Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa telepon, air, listrik, internet selama bulan Januari s.d September 2025;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp. 57.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.577.000,- atau 37,85% dengan sisa pagu anggaran Rp. 35.423.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama bulan Januari s.d September 2025.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 330.128.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.907.849,- atau 52,68% dengan sisa pagu anggaran Rp. 156.220.151,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 11 unit

kendaraan dinas roda empat dan 4 unit kendaraan dinas roda dua selama bulan Januari s.d September 2025;

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 83.302.757,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.825.950,- atau 50,21% dengan sisa pagu anggaran Rp. 41.476.807,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin selama bulan Januari s.d September 2025;
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.750.000,- atau 99,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 250.000,-.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

- 1) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan pagu Rp. 34.248.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.980.000,- atau 14,54% dengan sisa pagu anggaran Rp. 29.268.400,-.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 2.112.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.408.025.000,- atau 66,67% dengan sisa pagu anggaran Rp. 730.975.000,-;
- 2) Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 209.056.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 209.056.000,-;
- 3) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan pagu Rp. 101.074.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.377.811,- atau 80,51% dengan sisa pagu anggaran Rp. 19.696.589,-.

4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - 1) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota dengan pagu Rp. 93.152.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.493.500,- atau 84,26% dengan sisa pagu anggaran Rp. 14.658.500,-. Hasil yang dicapai laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting bulan Januari s/d September 2025.
 - 2) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 287.600.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.350.000,- atau 49,15% dengan sisa pagu anggaran Rp. 146.250.000,-. Hasil yang dicapai terlaksananya operasi pasar sebanyak 6 kali.
- b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
 - 1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan pagu Rp. 38.254.800,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.865.528,- atau 93,75% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.389.272,-. Hasil yang dicapai laporan hasil pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi bulan Januari s/d September 2025.

5. Program Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - 1) Pameran Dagang Internasional / Nasional dengan pagu Rp. 339.996.243,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.380.000,- atau 1,29% dengan sisa pagu anggaran Rp. 335.616.243,-;

- 2) Pameran Dagang Lokal dengan pagu Rp. 214.160.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.160.000,- atau 69,65% dengan sisa pagu anggaran Rp. 65.000.000,-;

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 339.838.714,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.272.625,- atau 11,85% dengan sisa pagu anggaran Rp. 299.566.089,-.
- b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu Rp. 100.891.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.931.000,- atau 19,75% dengan sisa pagu anggaran Rp. 80.960.200,-.
 - 2) Pengembangan Layanan Pengujian dengan pagu Rp. 131.354.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 117.409.180,- atau 89,38% dengan sisa pagu anggaran Rp. 13.944.820,-.
- c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 139.802.500,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.301.410,- atau 36,70% dengan sisa pagu anggaran Rp. 88.501.090,-.

7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
 - 1) Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan pagu Rp. 122.500.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.481.000,- atau 46,11% dengan sisa pagu anggaran Rp. 66.019.000,-.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dalam pembinaan dan pengembangan sektor Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor Perdagangan masih kurang didukung data yang akurat dan tersedia belum tertata dengan baik
2. Pelaksanaan program/kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

Saran tindak lanjut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Perdagangan perlu dukungan dan kerjasama dengan Instansi/OPD lain
2. Data sektor perdagangan perlu pengelolaan lebih baik lagi
3. Pelaksanaan program/kegiatan perlu diatur lebih baik lagi dan didukung oleh pengelolaan pendanaan internal OPD yang baik

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD/APBN TRIWULAN III Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197907082006042005

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN SEPTEMBER TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	12,144,024,617	7,966,326,920		75.83	APBD			Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	%	100%	100%	162,272,000	89,787,400		66.00	APBD			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,642,000	79,787,400	88.02	98.00	APBD	Palembang		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	10,000,000	66.67	100.00	APBD	Palembang		
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	56,630,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumatera Selatan		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	%	100%	100%	10,174,287,000	6,809,512,408	66.93	80.67	APBD			
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	714 OB untuk 51 orang	602 OB untuk 43 orang	9,494,674,000	6,312,435,408	66.48	75.00	APBD	Palembang		
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	440,813,000	404,987,000	91.87	92.00	APBD	Palembang		
	6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	238,800,000	92,090,000	38.56	75.00	APBD	Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	%	100%	100%	13,080,000	9,300,000	71.10	75.00	APBD			
	7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13,080,000	9,300,000	71.10	75.00	APBD	Palembang		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlayani	%	100%	100%	718,790,200	373,521,180	51.97	75.00	APBD			
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	25,000,000	18,750,000	75.00	75.00	APBD	Palembang		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	108,335,000	72,748,000	67.15	75.00	APBD	Palembang		
	10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4 Paket	4 Paket	55,000,000	36,959,000	67.20	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan											
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	10,605,000	70.70	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan											
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	515,455,200	234,459,180	45.49	75.00	APBD	Sumatera Selatan, Luar Provinsi		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	100%	100%	462,164,660	268,722,133	58.14	75.00	APBD			
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	8,870,000	73.92	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	393,164,660	238,275,133	60.60	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57,000,000	21,577,000	37.85	75.00	APBD	Palembang		
vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	%	100%	100%	613,430,757	415,483,799	67.73	83.33	APBD			
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	144 Unit/Tahun (R4=13 unit, R2= 7 unit)	144 Unit/Tahun (R4=13 unit, R2= 7 unit)	330,128,000	173,907,849	52.68	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Biaya Pemeliharaan											
	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	50 Unit	50 Unit	83,302,757	41,825,950	50.21	75.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara											
	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1 Gedung	1 Gedung	200,000,000	199,750,000	99.88	100.00	APBD	Palembang		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi											
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	%	100%	100%	34,248,400	4,980,000	14.54	75.00	APBD		5. Investasi	Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
i	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengedar Terdaftar	Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	100%	100%	34,248,400	4,980,000	14.54	75.00	APBD			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	19 Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	4 Laporan	5 1 Laporan	6 1 Laporan	7 34,248,400	8 4,980,000	9 14.54	10 75.00	11 APBD	12 Sumatera Selatan	13	14
III	PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit	1200 Unit	1200 Unit	2,422,130,400	1,489,402,811	61.49	61.00	APBD		1. Kemiskinan	1) Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi 2) Kerjasama dengan Dinas di Kabupaten/Kota untuk pendistribusian
I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit	1200 Unit	1200 Unit	2,422,130,400	1,489,402,811	61.49	61.00	APBD			
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1200 Unit	1200 Unit	2,112,000,000	1,408,025,000	66.67	98.00	APBD	Sumatera Selatan		
21	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	209,056,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumatera Selatan		
22	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	Orang	50 Orang	50 Orang	101,074,400	81,377,811	80.51	85.00	APBD	Sumatera Selatan		
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%	≤5%	419,006,800	255,709,028	61.03	89.00	APBD		3. Inflasi	1. Didukung kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam mengatasi gejolak harga 2. Adanya sistem SP2KP dari Kementerian Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
i	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%	≤5%	380,752,000	219,843,500	57.74	80.00	APBD			
	23 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Laporan	12 laporan	12 laporan	93,152,000	78,493,500	84.26	85.00	APBD	Sumatera Selatan		
	24 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	287,600,000	141,350,000	49.15	75.00	APBD	Palembang		
ii	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi	%	100%	100%	38,254,800	35,865,528	93.75	98.00	APBD			
	25 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90%	Laporan	1 laporan	1 laporan	38,254,800	35,865,528	93.75	98.00	APBD	Sumatera Selatan		
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5 - 5%	2,5 - 5%	554,156,243	153,540,000	27.71	75.00	APBD		5. Investasi	1. Barang yang diekspor masih merupakan barang mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal 2. Infrastruktur pelabuhan yang memadai.

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
i	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan	Kali	3 kali	3 kali	554,156,243	153,540,000	27.71	75.00	APBD			
	26 Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	339,996,243	4,380,000	1.29	75.00	APBD	Luar Provinsi, Luar Negeri		
	27 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	214,160,000	149,160,000	69.65	75.00	APBD	Sumatera Selatan		
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	1). 90% 2). 100% 3). 70%	1). 90% 2). 100% 3). 70%	711,886,414	228,914,215	32.16	77.50	APBD		4. P3DN	1. Didukung oleh BPSK Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau 2. Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
i	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	90%	90%	339,838,714	40,272,625	11.85	75.00	APBD			
	28 Pemberdayaan Konsumen dan Kelenbagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	2 BPSK	2 BPSK	339,838,714	40,272,625	11.85	75.00	APBD	Sumatera Selatan		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	ii	2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	4 %	5 100%	6 100%	7 232,245,200	8 137,340,180	9 59.14	10 82.50	11 APBD	12	13	14
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi dan Diterbitkan	Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,891,200	19,931,000	19.75	75.00	APBD	Sumatera Selatan		
	30	Pengembangan Layanan Pengujian Mutu Barang	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	131,354,000	117,409,180	89.38	90.00	APBD	Sumatera Selatan		
	iii	3 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	%	70%	70%	139,802,500	51,301,410	36.70	75.00	APBD			
	31	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketertuan Berlingkungan Konsumen	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	139,802,500	51,301,410	36.70	75.00	APBD	Sumatera Selatan		
VII PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
i	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	UMKM	10 UMKM	10 UMKM	122,500,000	56,481,000	46.11	75.00	APBD		4. P3DN	Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
32	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	10 UMKM	10 UMKM	122,500,000	56,481,000	46.11	75.00	APBD	Luar Provinsi		
Jumlah : 32 subkegiatan							16,407,952,874	10,155,353,974	61.89	75.48			

Kendala dan hambatan bulan ini:

Palembang, Oktober 2025

Pt. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan,


HENNY YULIANTI, S.P., MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197907082005042005

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
1		Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Sumsel	%	10	8.78 * per triwulan II	87.80	
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase penyelesaian permasalahan perselisihan konsumen	%	90	75.00	83.33	1. Didukung oleh BPSK Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau 2. Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	100	100.00	
		Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	70	19.87	28.38	
		Neraca Perdagangan	US\$ jt	5,253	3.550,79 *per Jan-Agt 2025	67.60	
3	Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas Luar Negeri	US\$ jt	5,777	3.995,47 *per Jan-Agt 2025	69.16	1. Barang yang diekspor masih merupakan barang mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal 2. Infrastruktur pelabuhan yang memadai.
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5-5	4.15 *per Jan-Agt 2025	83.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
4	Terkendalinya Keterjangkauan Harga	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5	1.4	28	1. Didukung kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam mengatasi gejolak harga 2. Adanya sistem SP2KP dari Kementerian Perdagangan
5	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	%	25	25	100	1) Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi 2) Kerjasama dengan Dinas di Kabupaten/Kota untuk pendistribusian

Palembang, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan,



HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197907082006042005